

KONFLIK DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Mata Kuliah Organisasi Internasional dan Globalisasi

Dosen Pengampu:

Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



KELOMPOK 9

ANGGOTA KELOMPOK 9

1 **DEA NOVITA SARI** **(2116041035)**

2 **RAHEL OKTAFARIYANTI S (2116041040)**

3 **AYU BALQIS AULIA** **(2116041066)**

4 **OKTA ZULLAILLI** **(2116041067)**

5 **ANNA MARIA** **(2116041100)**

KONSEP DASAR KONFLIK DAN ORGANISASI INTERNASIONAL



INTERNATIONAL
CONFLICTS

Konsep Dasar Konflik

Konflik merupakan fenomena yang sering ditemui dalam kehidupan organisasi maupun sehari-hari. Meskipun tidak dapat dihindari, konflik perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu jalannya organisasi. Menurut Robbins & Judge (2013), konflik adalah pertentangan atau ketidakcocokan dalam interaksi yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain memengaruhi atau akan memengaruhi secara negatif hal yang dianggap penting olehnya. Marquis & Huston (2015) mendefinisikan konflik sebagai perselisihan yang menghasilkan perbedaan dalam ide, nilai, atau perasaan antara dua orang atau lebih. Sementara itu, Naraina (2012) menyatakan bahwa konflik dapat dilihat sebagai ekspresi permusuhan, sikap negatif, antagonisme, agresi, persaingan, atau kesalahpahaman yang melibatkan perbedaan kepentingan yang kontradiktif antara dua kelompok. Dari beragam pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu pertentangan, ketidakcocokan, perselisihan dan dapat dianggap sebagai ekspresi permusuhan, agresi, persaingan serta kesalahpahaman dari proses suatu interaksi yang menganggap pihak lain telah mempengaruhi secara negatif.

KONSEP DASAR KONFLIK DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Konsep Dasar Organisasi Internasional



Organisasi internasional adalah aktor non-negara yang memiliki peranan penting dalam dinamika hubungan internasional Konsep ini muncul sejak satu abad lalu sebagai bentuk kerja sama formal di abad ke-20. Sebelumnya, terdapat aliansi militer, organisasi antar pemerintah negara-negara berdaulat, serta aktor non-negara seperti Gereja Katolik dan Kekaisaran Romawi. Menurut Clive Archer, organisasi internasional adalah struktur formal yang berkelanjutan, dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota dari dua atau lebih negara berdaulat, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dengan tujuan mengejar kepentingan bersama. Organisasi internasional memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki tujuan internasional, anggota dengan hak suara, anggaran dasar dan markas, pegawai dari berbagai bangsa, dibiayai anggota dari berbagai negara, berdiri sendiri, serta tetap aktif. Organisasi internasional juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara-negara anggotanya.



MANAJEMEN KONFLIK ORGANISASI INTERNASIONAL

Aktivitas agen-agen internasional seperti Organisasi Internasional, Regional, dan Non-Pemerintah yang bergerak dalam penyelesaian konflik sering dihadapkan dengan berbagai hambatan, termasuk tantangan teknis, finansial, dan budaya. Prinsip-prinsip seperti *Impartiality* (keadilan bagi semua), *Mutuality* (keterbukaan dan kerja sama), *Sustainability* (komitmen), *Complementary* (kolaborasi), *Reflexivity* (transparansi dan kebaikan hati), *Consistency* (konsisten), *Accountability* (tanggung jawab), dan *Universality* (penerimaan dari berbagai kalangan) menjadi landasan penting dalam penyelesaian konflik (Miall et al., 1999).

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Sejak awal terbentuknya ASEAN, konflik antar negara telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi ini. Bahkan hingga saat ini, konflik antar negara anggota ASEAN masih terjadi. Meskipun demikian, ASEAN memiliki potensi sebagai fasilitator penyelesaian konflik di lingkup keanggotaannya dengan menerapkan prinsip-prinsipnya yang telah dibentuk. Mekanisme penyelesaian konflik di ASEAN tercermin dalam beberapa dokumen kunci, termasuk ASEAN Declaration (Bangkok Declaration). Melalui berbagai dokumen kunci dan mekanisme penyelesaian konflik tersebut, ASEAN menanggapi persoalan Laut Cina Selatan dengan melakukan penyusunan *Code of Conduct* (COC), terbukti bahwa ASEAN mengedepankan diplomasi melalui berbagai pendekatan sebagai cara utama dalam memfasilitasi penyelesaian konflik.

MANAJEMEN KONFLIK ORGANISASI INTERNASIONAL

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB memainkan peran sentral dalam resolusi konflik di tingkat global. Galtung (1996) menegaskan bahwa PBB harus aktif dalam *Peace Making*, *Peace Keeping*, dan *Peace Building* sebagai bagian dari agenda perdamaian. Saat ini, PBB memiliki legitimasi dan kapasitas untuk terlibat mulai dari pencegahan konflik hingga rekonstruksi pasca konflik di seluruh dunia. Manajemen konflik oleh PBB mencakup serangkaian tindakan yang meliputi identifikasi dan analisis konflik, mediasi antara pihak yang bertikai, pemantauan perdamaian, penyebaran pasukan perdamaian, serta pembangunan kembali infrastruktur dan masyarakat pasca konflik. PBB juga bekerja sama dengan negara-negara anggota dan organisasi regional untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik.



STUDI KASUS UPAYA ATAU STRATEGI ORGANISASI DALAM KONFLIK

Dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi, peran organisasi internasional menjadi krusial dalam memelihara perdamaian, keamanan, dan menyelesaikan konflik di antara negara-negara anggotanya.

Upaya atau Strategi ASEAN pada Konflik Laut Cina Tahun 2010-2015 :

Laut Cina Selatan adalah bagian dari Samudera Pasifik yang strategis, meliputi sebagian wilayah dari beberapa negara termasuk China, Taiwan, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Vietnam. Konflik di kawasan ini berkaitan dengan klaim wilayah, sumber daya alam, dan jalur perdagangan laut internasional. Tiongkok menegaskan klaimnya dengan "sembilan garis putus-putus" dan memperkuat kehadiran militer dengan pembangunan pulau buatan. ASEAN berusaha menyelesaikan konflik melalui inisiatif seperti *Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) pada 1971, Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan (*Code of Conduct on South China Sea*) pada 2011, dan optimalisasi peran ASEAN Regional Forum dalam penyelesaian sengketa. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memperluas kerja sama, mengatur aturan, dan meningkatkan dialog antara negara-negara terkait.

Upaya atau Strategi PBB dan African Union pada Konflik Bersenjata Non-Internasional di Darfur, Sudan :

Konflik bersenjata di Darfur, Sudan, didorong oleh tiga faktor utama: persaingan suku atas sumber daya alam, pengecualian oleh pemerintah pusat di Khartoum, dan campur tangan aktor luar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Konflik dimulai pada tahun 1990-an dan melibatkan Gerakan Pembebasan Darfur (DLF), yang kemudian terpecah menjadi SLM/A dan JEM. Konflik tersebut melibatkan pemerintah Sudan dan milisi Janjaweed melawan kelompok pemberontak. Konflik ini awalnya merupakan konflik internal tetapi kemudian menjadi konflik non-internasional. PBB bertanggung jawab atas situasi di Darfur dan berupaya untuk mencapai perdamaian dengan bekerja sama dengan Uni Afrika. Upaya ini mencakup mediasi perdamaian, penyediaan bantuan kemanusiaan serta mengorganisir operasi penjaga perdamaian. Tiga operasi penjaga perdamaian yang terbentuk selama konflik di Darfur mencakup *African Union Mission in Sudan* (AMIS), *United Nation Mission in the Sudan* (UNMIS), dan *United Nations African Union Mission in Darfur* (UNAMID).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan fenomena yang kompleks dan vital dalam dinamika global. Interaksi antara negara-negara seringkali diwarnai oleh konflik akibat perbedaan pandangan, kepentingan, dan sumber daya. Organisasi internasional, seperti PBB dan ASEAN, memainkan peran penting sebagai fasilitator, mediator, dan operator independen dalam menyelesaikan konflik. Melalui forum-forum ini, negara-negara dapat berunding, bermediasi, bernegosiasi, dan melakukan intervensi guna mencapai solusi damai dan mendorong kerja sama dalam menangani tantangan global. Studi kasus yang ada menunjukkan berbagai upaya organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik, seperti ASEAN dalam menciptakan stabilitas regional di Laut Cina Selatan dan PBB serta African Union dalam menangani konflik di Darfur, Sudan. Dengan meningkatnya kompleksitas isu global, organisasi internasional semakin penting dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di tingkat nasional dan internasional.

SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan guna meningkatkan efektivitas peran organisasi internasional dalam menangani konflik antarnegara.

- Perkuat kerja sama antara organisasi internasional dan negara-negara anggota dalam mengatasi tantangan global melalui aliansi strategis, pertukaran informasi, dan koordinasi kebijakan.
- Diperlukan upaya lebih lanjut dalam mempromosikan dialog, mediasi, dan diplomasi sebagai cara utama untuk menyelesaikan konflik, daripada mengandalkan tindakan militer atau sanksi ekonomi.
- Organisasi internasional perlu terus mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan terpercaya, serta memastikan implementasi kebijakan dan resolusi yang dihasilkan.
- Negara-negara anggota harus menghormati kewenangan dan mandat organisasi internasional, serta upayakan rekonstruksi pasca-konflik guna membangun masyarakat yang stabil & berkelanjutan secara ekonomi, sosial, politik.



KELOMPOK 9

TERIMA KASIH!